IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM SATU ARAH PADA RUAS JALAN MAYOR ABDURAHMAN SUMEDANG

Arip Rahman Sudrajat*, Nur Widia Pranawati, Nissa Sawitri
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang
E-mail: arip.rs84@gmail.com

Abstract

This research on the Analysis of One-Way System Policy Implementation on Mayor Abdul Rahman Roads is motivated by traffic congestions that often occur on Jalan Mayor Abdul Rahman. In order to unravel that traffic congestions, the local government has made an effective traffic engineering policy. One of the efforts that can be done is to implement a one-way or one-way system policy on Major Abdul Rahman roads. From the preliminary data, it is known that the roads are congested. The implementation of this one-way system policy starts from the Pacific bridge to the Ojolali intersection. By implementing this one-way system policy, the government hopes to reduce the level of congestion on these roads. The research method used in the preparation of this report is descriptive method with a qualitative approach. The data obtained sourced from literature studies, field studies through activities such as observation, interviews, and documentation. In an effort to unravel congestion in the urban area of Sumedang, the Transportation Service (Dishub) of the Sumedang Regency Government carries out traffic engineering. The implementation of the one-way system policy is applied to the Major Abdul Rahman road section. On March 4, 2019, the Sumedang Regency government, supported by the Sumedang Police, carried out a traffic engineering trial to inform the public about the policies to be implemented. The traffic engineering trial was carried out around Jalan Mayor Abdurahman in the north and its surroundings. The implementation is guided by officers from the Sumedang Transportation Service and Police. One of the objectives of this traffic engineering is for the arrangement in the urban area of Sumedang.

Keywords: Public Policy, Policy Implementation, One Way Transportation.

PENDAHULUAN

Kemacetan lalu lintas merupakan suatu permasalahan yang perlu diperhatikan, karena dapat menghambat kegiatan dan aktivitas sosial sehari-hari. Salah satu faktor kemacetan lalu lintas adalah banyaknya jumlah kendaraan di Kabupaten Sumedang akibat pertambahannya yang terus meningkat secara tidak terkontrol baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, hingga akhir tahun 2018 tercatat sebanyak 1.432 uni mobil pengangkut umum (MPU) yang aktif di Kabupaten Sumedang.

Dalam rangka menciptakan ketertiban dan kenyamanan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang telah membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dan menciptakan ketertiban lalu lintas pada ruas jalan Mayor Abdul Rahman,

Kabupaten Sumedang yaitu Kebijakan Sistem Satu Arah (SSA). Ruas Jalan Mayor Abdul Rahman merupakan ruas jalan dengan intensitas kendaraan yang cukup ramai mengingat ruas jalan tersebut menghubungkan antar kecamatan yaitu Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Sumedang Selatan. Kebijakan tersebut sudah diterbitkan melalui Peraturan Bupati nomor 109 tahun 2019 tentang Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Dalam Kota.

Kenyamanan dalam berlalu lintas salah satunya dapat dirasakan melalui kelancaran arus lalu lintas. Kemacetan lalu lintas pada ruas jalan Mayor Abdul Rahman tentu akan menghambat aktivitas masyarakat Kabupaten Sumedang, artinya kelancaran lalu lintas akan sangat berdampak pada efektifitas kegiatan masyarakat Kabupaten Sumedang. Kebijakan sistem satu arah merupakan

jawaban dari permasalahan kemacetan lalu lintas khususnya pada ruas jalan Mayor Abdul Rahman. Dengan adanya kebijakan ini, beban jalan pada ruas jalan Mayor Abdul Rahman akan menjadi seimbang dengan ruas jalan Tampomas.

Pemberlakuan sistem satu arah akan berdampak pada kelancaran lalu lintas melalui pembagian jalur yang dilalui oleh kendaraan sehingga penumpukan kendaraan di ruas jalan Mayor Abdul Rahman dapat berkurang. Penumpukan kendaraan sering terjadi pada ruas jalan tersebut terlebih lagi pada waktu tertentu ketika masyarakat beraktifitas dan melakukan mobilisasi ke tempat yang berlokasi di sepanjang ruas jalan Mayor Abdul Rahman. Disamping penumpukan kendaraan, angkutan umum juga menjadi faktor pendorong terjadinya kemacetan lalu lintas pada ruas jalan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan merupakan dokumen belaka, oleh sebab itu tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Winarno (2005) menyebutkan, "Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atas tujuan yang diinginkan".

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang dikutip oleh Agustino (2012), mendefinisikan implementasi kebijakan yaitu "Pelaksana keputusan kebbijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan-tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk

Kebijakan sistem satu arah yang diterapkan di ruas jalan Mayor Abul Rahman, telah di uji coba pada tanggal 4 Maret 2019. Setelah melalui tahapan uji coba, akhirnya kebijakan tersebut resmi diberlakukan ditandai dengan terbitnya Peraturan Bupati nomor 109 tahun 2019 tentang Rekayasa Lalu Lintas Kawasan dalam Kota.

Fokus permasalahan pada penelitian ini terdiri dari 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Satu Arah Pada Ruas Jalan Mayor Abdurahman Sumedang?; 2) Apa Saja Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Satu Arah Pada Ruas Jalan Mayor Abdurahman Sumedang?; 3) Upaya Apa Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Satu Arah Pada Ruas Jalan Mayor Abdurahman Sumedang?.

menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya".

Berdasarkan pengertian di atas, suatu kebijakan berisi suatu program untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Kebijakan publik mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau pemerintah, suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus di implementasikan oleh unit-unit administrasi yang akan memanfaatkan sumber daya finansial dan sumber daya manusia.

Dimensi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan-tahapan yang penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya tercapainya tujuan. Berdasarkan pengertian implementasi di atas Van Meter dan Van

Horn dalam Agustino (2012) sebagai berikut.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan,
2. sumber daya kebijakan,
3. karakteristik agen pelaksana,
4. sikap / kecenderungan (*disposition*) para pelaksana,
5. komunikasi antar organisasi terkait,
6. lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Dimensi dasar-dasar kebijakan publik Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino (2012) tersebut untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan secara terperinci sebagai berikut.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan, maksudnya keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2. Sumber daya kebijakan, maksudnya keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu proses keberhasilan implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka keberhasilan kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.
3. Karakteristik agen pelaksana, maksudnya pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena keberhasilan kebijakan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksanaannya. Selain itu, cakupan atau

luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana.

4. Sikap/ kecenderungan para pelaksana, maksudnya sikap penerimaan atau sikap penolakan dari agen pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi masyarakat setempat yang mengenal permasalahan yang dirasakan, melainkan dari para implementor pelaksanaan kebijakan "dari atas" (*top down*) yang tidak mengetahui permasalahannya.
5. Komunikasi antar organisasi terkait, koordinasi komunikasi sangat diperlukan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi agar tidak terjadi miss communication antara sesama pelaksana. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu juga sebaliknya.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, maksudnya sejauhmana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan dari kinerja implementasi kebijakan itu sendiri.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Bambang Sunggono (2004), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu sebagai berikut.

- a. Isi kebijakan. Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan

- yang akan mengimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
- b. Informasi. Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
 - c. Dukungan. Pelaksanaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - d. Pembagian Potensi. Sebab manusia yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Publik

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik menurut Sunggono (2004) sebagai berikut.

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- d. Warga masyarakat sebagai objek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundangundangan.

Kebijakan Sistem Satu Arah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki berbagai konsep perencanaan guna meningkatkan kesejahteraan tiap masyarakat. Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang, kota Sumedang sendiri yang terbilang sudah cukup mengalami kemajuan, dapat dilihat dari makin padatnya kendaraan yang ada. Hal ini sudah sangat lazim ditemui diberbagai ruas jalanan di kota Sumedang mulai dari tempat-tempat perbelanjaan, perkantoran maupun pusat keramaian lainnya cukup padat dengan kendaraan, hal tersebut dipicu salah satu nya karena banyak pemilik kendaraan yang

memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak seharusnya, bahkan parkir di tempat yang nyatanya sudah terpampang jelas rambu lalu lintas dilarang parkir.

Terpusatnya aktivitas bisnis, perbankan, perkantoran dan pusat perbelanjaan maupun perumahan yang membuat kemacetan semakin meningkat setiap harinya. Berbagai upaya dan kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah tersebut telah diimplementasikan, namun belum juga berdampak besar bagi penanggulangan kemacetan di kota Sumedang.

Pada tanggal 4 maret 2019 pemerintah Kota Sumedang mulai mengujicobakan kebijakan guna mengatasi kemacetan di kota Sumedang dengan kebijakan "One Way Traffic" atau jalur satu arah. Jika sebelumnya jalur transportasi ada dua arah kini dibuat sesuai namanya jalur satu arah yang mengikuti arah jarum jam.

METODE

Dalam metode ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian metode Kualitatif metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sistem satu Arah Pada Ruas Jalan Mayor Abdurahman Sumedang

Implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur yang terdiri dari pelaku, organisasi, prosedur dan teknik dan diharapkan dapat bekerjasama guna

Adanya pemusatan kegiatan perekonomian dan pusat kegiatan manusia seperti pusat pertokoan, pasar, perkantoran, sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya di pusat kota mengakibatkan meningkatnya arus lalu lintas yang menimbulkan banyak titik-titik konflik antar kendaraan dengan kendaraan lain maupun pejalan kaki yang mendorong dilakukannya jalan satu arah. Diharapkan penerapan jalan satu arah mampu memberikan titik terang dalam pemecahan permasalahan lalu lintas di Kota Sumedang.

Rekayasa lalu lintas ini dilakukan di Jalan Mayor Abdurachman dan Jalan Tampomas yang berdampingan dan terhalang bangunan pertokoan menjadi satu jalur, selain untuk mengurai kemacetan yang terjadi mulai dari area Taman Endog sampai perempatan lampu merah Ojolali, rekayasa lalu lintas juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

studi lapangan. Sedangkan prosedur pengolahan data terdiri dari data *display*, data *reduction*, dan *conclusion*.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Aset dan Kepegawaian, Kepala Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, dan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir. Para Informan merupakan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

mewujudkan tujuan yang diinginkan. Pentingnya pelaksanaan suatu kebijakan dapat kita lihat dari fungsi pelaksanaan kebijakan itu sendiri untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran yang telah ditentukan agar dapat diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan-kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah.

Untuk lebih mempermudah pemahaman, dalam pembahasan penelitian ini, peneliti merujuk kepada dimensi-dimensi implementasi kebijakan publik menurut Edward III (1980) sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelau kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam menerapkan suatu kebijakan, diperlukan adanya komunikasi yang baik yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi kebijakan yang dilakukan harus dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Transmisi, yang berkenaan bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan, sehingga para pelaksana mengetahui kebijakan tersebut;
- (b) Kejelasan, yang berkenaan dengan pemahaman para pelaksana tentang isi kebijakan tersebut;
- (c) Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana.

Hasil penelitian terkait transmisi dalam implementasi kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan Mayor Abdurahman menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan sistem satu arah pada jalan Mayor Abdurahman sudah tersampaikan serta terlaksana dengan baik pada seluruh pihak terkait, baik itu pelaksana kebijakan maupun pada kelompok sasaran kebijakan. Baik masyarakat maupun pelaksana kebijakan sama-sama mendapatkan informasi

mengenai kebijakan sistem satu arah. Untuk kejelasan kebijakan menunjukkan bahwa Pegawai Dinas Perhubungan dibantu oleh Polres Sumedang sudah melakukan tugasnya dalam menyampaikan kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan Mayor Abdurahman termasuk dalam menyampaikan tujuan diterapkannya kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan tersebut. Masyarakat dari berbagai kalangan sudah memahami dan mengerti tujuan dari diterapkannya kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan Mayor Abdurahman. Konsistensi dalam implementasi kebijakan menunjukkan bahwa Konsistensi pelaksanaan atau implementasi kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan Mayor Abdurahman yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan dan Polres Sumedang terlaksana dengan baik. Semua pihak terkait melaksanakan tugas sesuai tupoksi nya masing-masing Pelaksanaan kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan Mayor Abdurahman terpantau terlaksana dengan baik dan konsisten.

b. Sumber Daya

Setiap organisasi baik organisasi bisnis maupun organisasi public (pemerintah) tentu memiliki sumber daya guna mencapai tujuan yang telah dicapai. Sumber daya yang dimiliki, terdiri dari 2 dua jenis yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya buatan (SDB). Sumber daya manusia berfungsi sebagai unsur penggerak dari setiap program yang dimiliki oleh organisasi. Sedangkan sumber daya buatan sebagai fasilitas atau pendukung dalam merealisasikan program tersebut.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas-tugas, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang

dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik serta mendukung implementasi kebijakan. Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang terdiri dari sebanyak 194 orang. Keseluruhan jumlah tersebut, tentu menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap hasil yang

diperoleh oleh Dinas Perhubungan. Untuk itu, kualitas sumber daya manusia perlu diperhatikan. Potensi-potensi sumber daya manusia yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						JML
		SD	SMP	SMA/ SMK	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	-	-	5	-	3	4	12
2	Bidang Angkutan	-	1	3	-	4	-	8
3	Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa lalu Lintas	-	-	1	-	4	1	6
4	Bidang Bidang Teknik Fasilitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	-	-	1	-	3	1	5
5	Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	-	-	9	-	2	2	13
6	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	6	1	2	-	9
7	UPT Terminal Wado	-	1	3	-	2	-	6
8	UPT Penerangan Jalan Umum (PJU)	-	-	2	-	1	1	4
9	Non PNS	-	7	85	7	30	2	131
TOTAL		0	9	115	8	51	11	194

Sumber: Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksana kebijakan (Polisi lalu lintas dan Dishub) sudah memiliki persiapan yang baik sebelum melaksanakan kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan Mayor Abdurahman. Kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jangka menengah dan jangka panjang dibuat oleh Dinas Perhubungan. Untuk pelaksanaan operasionalnya selama masa percobaan dilaksanakan oleh polisi lalu lintas. Seluruh pelaksana kebijakan melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan kebijakan sistem satu arah yang berlaku.

Selain sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya yang

dibutuhkan dalam mengimplementasi kebijakan adalah fasilitas. Berdasarkan hasil penelitian mengenai fasilitas menunjukkan bahwa Fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang keterlaksanaanya kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan Mayor Abdurahman sudah terpenuhi dengan baik.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana akan mengakibatkan permasalahan yang akan timbul pada implementasi kebijakan jika personilnya tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan atau pengangkatan personil untuk melaksanakan kebijakan adalah orang-

orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian mengenai dimensi disposisi yaitu Dalam pengangkatan pelaksana kebijakan telah disesuaikan dengan kemampuan dan tugasnya masing-masing dan pelaksana kebijakan yang melaksanakan tugasnya dengan baik akan mendapatkan insentif sebagai bentuk *reward* karena telah melakukan tugasnya dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Dalam menjalankan suatu birokrasi pemerintahan, tentu organisasi pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang memiliki struktur birokrasi di dalamnya. Untuk membahas indikator struktur birokrasi, peneliti menggunakan 2 (dua) item pertanyaan dalam proses wawancara, yaitu *Standart Operational Procedures* (SOP) dan Fragmentasi.

Pada indikator SOP menunjukkan hasil penelitian yaitu Pelaksana kebijakan sudah melakukan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku guna kebijakan sistem satu arah dapat berjalan dengan baik. Adapun indikator fragmentasi menunjukkan bahwa Fragmentasi telah dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi lain dalam hal penyelenggaraan kebijakan sistem satu arah ini dan Kedua instansi yang terlibat yaitu Dishub dan Polres Sumedang sudah melaksanakan tugas dengan cara menempatkan personil di titik-titik kemacetan lalu lintas.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Satu Arah Pada Ruas Jalan Mayor Abdurahman Sumedang

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, gambaran keberhasilan kebijakan tidak dapat diprediksi. Kebijakan publik akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, jika kebijakan tersebut didukung penuh oleh masyarakat dimana kebijakan

terseut ditetapkan. Begitu pula sebaliknya, apabila kebijakan yang diterapkan kurang mendapat dukungan atau perhatian masyarakat, kebijakan tersebut cenderung diabaikan.

Proses pembuatan atau penyusunan kebijakan public tentu merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Kebijakan public tidak dapat dibuat begitu saja tanpa memperhatikan aspek-aspek yang terkena dampak. Istilah yang lebih dikenal dengan 'formulasi kebijakan' ini akan berkaitan dengan beberapa hal, yaitu cara bagaimana suatu masalah, terutama masalah public mendapat perhatian dari para perumus kebijakan.

Formulasi kebijakan memiliki beberapa tahapan, dimulai dengan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternative kebijakan untuk memecahkan masalah, hingga pada akhirnya menuju tahap penetapan kebijakan. Meskipun telah mengalami proses yang panjang, akan tetapi tidak sedikit kebijakan public yang dalam realisasinya masih memerlukan banyak evaluasi karena terdapat beberapa faktor penghambat didalamnya.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dibutuhkan kerjasama yang baik antara pelaksana kebijakan dan penyelenggara kebijakan sehingga ketika ada hambatan dapat dicari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Respon dari masyarakat Kabupaten Sumedang selaku pelaksana kebijakan sistem satu arah akan mempengaruhi bagaimana kelanjutan kebijakan tersebut. Sehingga, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif memberi *feedback* atau umpan balik kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dibuat, baik berupa saran, kritik, atau melalui bentuk yang lainnya.

Selama penerapan kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan Mayor Abdurahman tidak terlalu banyak mengalami hambatan baik dalam segi penyampaian informasi kepada

masyarakat, dukungan dari berbagai pihak terkait, serta pelaksana kebijakan maupun penyelenggara kebijakan semuanya dapat bekerja sama dengan baik. Sempat terjadi demo yang dilakukan oleh angkutan umum pada awal diujicobakannya sistem satu arah, namun hanya berlangsung sebentar. Hal tersebut dikarenakan informasi yang disampaikan oleh pemerintah tepat sasaran dan jelas.

Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Satu Arah Ruas Jalan Mayor Abdurahman Sumedang

Membuat dan menyusun upaya alternative berupa upaya-upaya untuk mengatasi hambatan kebijakan public merupakan hal yang sangat penting, karena dalam setiap pengimplementasian kebijakan public, kita tidak pernah tau pasti bagaimana hasilnya. Karena hasil dari implementasi kebijakan public merupakan antusiasme dan respon dari masyarakat setempat. Untuk itu, sangat penting untuk membuat prediksi bahkan prediksi

dalam situasi yang buruk sekali pun. Tujuannya agar ketika implementasi kebijakan menimbulkan respon negative dari masyarakat, terdapat upaya-upaya yang telah dirancang sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu.

Dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi atau pun yang akan terjadi, pemerintah kota Sumedang menetapkan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2019 tentang rekayasa lalu lintas kawasan dalam kota. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat lebih sadar dan taat pada aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga memberikan wawasan dan informasi sebelum menerapkan kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan Mayor Abdurahman kepada masyarakat agar mengetahui tujuan diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya pun sudah dilakukan oleh petugas dari Dinas Perhubungan dan Polres Sumedang yang didukung dengan fasilitas yang cukup memadai.

PENUTUP

Kesimpulan

Membuat dan menyusun upaya alternative berupa upaya-upaya untuk mengatasi hambatan kebijakan public merupakan hal yang sangat penting, karena dalam setiap pengimplementasian kebijakan public, kita tidak pernah tau pasti bagaimana hasilnya. Karena hasil dari implementasi kebijakan public merupakan antusiasme dan respon dari masyarakat setempat. Untuk itu, sangat penting untuk membuat prediksi bahkan prediksi dalam situasi yang buruk sekali pun. Tujuannya agar ketika implementasi kebijakan menimbulkan respon negative dari masyarakat, terdapat upaya-upaya yang telah dirancang sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu.

1. Dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi atau pun yang akan terjadi, pemerintah kota Sumedang menetapkan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2019 tentang rekayasa lalu lintas kawasan dalam kota. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat lebih sadar dan taat pada aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga memberikan wawasan dan informasi sebelum menerapkan kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan Mayor Abdurahman kepada masyarakat agar mengetahui tujuan diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya pun sudah dilakukan oleh petugas dari Dinas Perhubungan dan Polres Sumedang

yang didukung dengan fasilitas yang cukup memadai.

Saran

1. Kebijakan sistem satu arah sebagai program wajib perhubungan akan menuntut dinas perhubungan untuk melakukan pengkajian lebih dalam terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Baik kemungkinan positif maupun kemungkinan negatif. Dampak positif dari penerapan kebijakan ini salah satunya peningkatan perekonomian pada kawasan pasar Sumedang (ruas jalan Tampomas) sehingga maksimalisasi kebijakan harus dilakukan melalui pengkajian lebih lanjut agar dampak bagi masyarakat pelaku ekonomi di kawasan tersebut lebih terasa.
2. Dalam pelaksanaannya sebaiknya Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dapat mempertahankan kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan dalam mengawasi bagaimana berjalannya

kebijakan sistem satu arah ini. Juga sebaiknya meningkatkan pengawasan pada titik tertentu di ruas jalan Mayor Abdurahman yang lebih rawan kemacetan serta pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan maka masyarakat Kabupaten Sumedang pun dapat menilai keseriusan pemerintah khususnya melalui dinas perhubungan dalam mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas. Karena kebijakan sistem satu arah merupakan kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

3. Meskipun penyediaan fasilitas maupun sumber daya pendukung lainnya dalam penerapan kebijakan sistem satu arah sudah cukup memadai, sebaiknya dilakukan pembaharuan dan pemeliharaan atas barang-barang dengan kondisi kurang baik, untuk menunjang kegiatan kinerja staff di lingkungan dinas perhubungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2004). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik. Vol.1(1)
- Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka setia.
- _____. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bintari, Antik. 2016. *Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.2(2)
- Budi, Winarno. (2005). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Handyaningrat, Soewarno. (2002). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Iskandar, Jusman. (2005). *Manajemen Publik*. Bandung: Puspaga.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. (2003). *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengukuran kinerja instansi pemerintah: Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
- Marshall E. Dimock, dkk. (1996). *Administrasi Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Muin, Fathkul. 2014. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.8(1)
- Siagian. (2013). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Bumi aksara.

_____. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sunggono, Bambang. (2004). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika

_____. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT. Karya Unipress.

Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.